



PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Ahmad Royani¹ dan Dwi Noviani²

^{1,2} Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI Indralaya

Email: arroyan56@gmail.com, dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Abstrack

This article aims to analyze the role of Islamic boarding schools in community development in the era of globalization. So far, Islamic boarding schools are known to be limited to traditional religious educational institutions with kyai and santri components. However, currently, Islamic boarding schools have made great progress in various ways, not only as traditional religious educational institutions but also as pioneers of social transformation. Therefore, this research is important as a vehicle for communicating to the government or the wider community about the role of Islamic boarding schools in their development. Community development is a fundamental concept that underlines many well-established terms such as resource development, rural community development, community economic development, rural revitalization and community-based development. The method used in this research uses a qualitative approach with the nature of library research with data collection techniques obtained through relevant literature: journals, textbooks and online literature. The research results show that the role of Islamic boarding schools has been implemented well in community development, which shows the quality of social relations and planned and gradual progress, such as improving public services and facilities, increasing local government accountability, increasing community participation, improving leadership, building new institutions, and initiate economic and physical development.

Keywords: *Islamic boarding school, Community Development, Globalization*



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pondok pesantren dalam pengembangan masyarakat di era globalisasi. Selama ini pondok pesantren dikenal terbatas pada lembaga pendidikan agama tradisional dengan komponen kyai dan santri. Namun, saat ini, pondok pesantren telah membuat kemajuan besar dalam berbagai hal, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama tradisional tetapi juga sebagai pelopor transformasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai wahana untuk menginformasikan kepada pemerintah atau masyarakat luas tentang peran pondok pesantren dalam perkembangannya. Pengembangan masyarakat adalah konsep fundamental yang menggarisbawahi banyak istilah yang sudah mapan seperti pengembangan sumber daya masyarakat, pengembangan kawasan pedesaan, pengembangan ekonomi masyarakat, revitalisasi pedesaan dan pembangunan berbasis masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui literatur yang relevan: jurnal, buku teks, dan literatur online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pondok pesantren telah dilaksanakan dengan baik dalam pengembangan masyarakat, yang menunjukkan kualitas hubungan sosial dan kemajuan yang terencana dan bertahap, seperti meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kepemimpinan, membangun kelembagaan baru, dan memulai pembangunan ekonomi dan fisik.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Pengembangan Masyarakat, Globalisasi

A. PENDAHULUAN

Peran Pondok pesantren sebelumnya dikenal terbatas hanya sebagai lembaga pendidikan agama tradisional dengan pelaku kyai dan santri sebagai komponennya. Sekarang, pesantren telah melakukan kemajuan besar sebagai lembaga pendidikan tradisional dan pelopor perubahan sosial di banyak bidang. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberi tahu pemerintah atau masyarakat luas tentang peran pondok pesantren dalam perkembangan mereka.

Pengembangan masyarakat (*community development*) adalah istilah mendasar yang menyoroti sekumpulan istilah yang telah ada sejak lama seperti *community resource development*, *rural areas development*, *community economic development*, *rural revitalisation* dan *community based development*. Pembangunan masyarakat (*community development*) menggambarkan implikasi penting dari dua konsep masyarakat; kualitas



hubungan sosial dan pengembangan perubahan menuju kemajuan yang direncanakan dan bertahap. Makna ini penting untuk makna pembangunan masyarakat yang sebenarnya. (Blackburn dalam Nasdian, 2003a).

Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah, peningkatan pelayanan dan fasilitas publik, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan tata kelola, pembentukan kelembagaan baru, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan fisik adalah semua contoh pengembangan masyarakat. Ini juga mencakup perencanaan lingkungan dan fisik yang digunakan untuk pembangunan. Definisi resmi PBB dalam Nasdian (2003a). *“community development is a process whereby the effort of government are united with those of the people to improve the social, cultural, and economics conditions in communities”* ini adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi orang-orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan. Secara umum, pengembangan masyarakat adalah konsep yang luas dan mencakup berbagai bentuk dan upaya, termasuk penerapan teori dan praktik seperti aktivis, kepemimpinan lokal, dan partisipasi warga dan profesional dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai definisi dari para ahli yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat dapat membantu orang yang tidak berdaya menjadi lebih kuat, menjadikan mereka lebih kuat, dan meningkatkan sosial ekonomi dan budaya mereka.

Pembangunan bagi kehidupan masyarakat menolong mengatasi isu-isu yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari kapasitas pemerintah dan aktor lain maupun dari kesetaraan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. (Nasdian, 2003b).

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Jika di masa lalu semakin banyak program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat, saat ini lembaga pendidikan juga melakukan pengembangan masyarakat. Di berbagai



negara termasuk Indonesia ikut berperan dalam proses pembelajaran terhadap anggota masyarakat.

Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang dapat bertahan tanpa pendidikan, karena setiap orang diharapkan dapat berkembang secara pribadi untuk mencapai tujuan akhir mereka sendiri dan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semua lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan pendekatan ekonomis untuk mencapai partisipasi penuh dan utuh tanpa mengorbankan kualitas akademik. Semua lembaga pendidikan harus terus memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat menjadi agen perubahan di masa depan. Dunia saat ini dan masa depan didominasi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendominasi dunia secara internasional. Namun, jika sains adalah strukturnya, keduanya juga merupakan dasar dunia internasional, termasuk hukum, perilaku keagamaan, dan etika (Hafizhuddin, 1998).

Khususnya di daerah pedesaan, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang membantu pembangunan. Pondok pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan yang tertanam kuat dalam sejarah negara dan tidak dapat disangkal peran yang mereka mainkan dalam sejarah perjuangan negara melawan kolonialisme (Nandika, 2005).

Assa mengungkapkan (2007) sebagai tempat pendidikan agama, Pondok pesantren diintegrasikan ke dalam masyarakat sehingga memiliki landasan sosial yang khas. Pada umumnya, pondok pesantren berkembang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pondok pesantren, di sisi lain, harus bertindak sebagai katalisator komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Mengingat tantangan dan peluang pondok pesantren di era globalisasi, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pondok pesantren dalam pembangunan masyarakat secara konseptual dan praktis.

Adapun dari penjelasan di atas, maka fokus dalam kajian dalam artikel ini adalah untuk menganalisis peran pondok pesantren dalam pengembangan masyarakat di era globalisasi. Dengan kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan pengembangan pesantren, sehingga harapannya kedepan pesantren dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan masyarakat.



B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui literatur yang relevan: jurnal, buku teks, dan literatur online yang terkait dengan peran pondok pesantren dalam pengembangan masyarakat di era globalisasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, yaitu mengkategorikan atau mengelompokkan data secara terpisah dalam arti mendiskusikan beberapa ide atau gagasan dari para ahli, kemudian mendeskripsikan data yang serupa dan mengkritisi isinya untuk mendapatkan hasil yang spesifik dan relevan (Dedy Mulyana, 2017: 157).

C. HASIL PENELITIAN

1. Konsep Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Istilah pondok pesantren adalah dua istilah dengan satu makna. Kata pondok berarti rumah bambu sederhana atau tempat tinggal, pondok juga mungkin berasal dari bahasa Arab *funduk*, yang berarti penginapan atau hotel. Sedangkan kata pesantren pada dasarnya berarti tempat belajar para siswa atau santri.

Pendidikan Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sangat dibantu oleh pondok pesantren. Menurut catatan yang masih ada, pendidikan agama di Indonesia dimulai pada tahun 1596. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel, seorang ulama Indonesia yang mendirikan pusat penelitian di Aceh pada tahun 2000, kegiatan keagamaan kemudian dikenal dengan nama pesantren. Pada abad ke-12, tulisan penting dibuat di Palembang (Sumatera), Jawa Timur, dan Gowa (Sulawesi), yang menarik minat siswa untuk belajar.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dengan lima komponen utama. 1. Pondok atau asrama: tempat tinggal siswa atau santri. Tradisi dan karakteristik pondok pesantren membedakannya dengan sistem pendidikan lain



yang berkembang di Indonesia. 3. Pengajaran kitab-kitab klasik: tujuan utama pendidikan di pondok pesantren, "Santri": istilah yang biasa digunakan untuk menyebut santri atau santri yang belajar di pondok pesantren, "Masjid": tempat para santri diajarkan secara khusus dalam amalan-amalan, seperti shalat, pengajian kitab-kitab klasik, dan pengkaderan imam-imam (Zamakhsyari Dhofier, 1982).

b. Pengembangan Pondok Pesantren

Menurut Saifarrahan (2005), sejarah masuknya Islam ke Indonesia memengaruhi pembentukan pondok pesantren di Indonesia. Umat Islam sangat bangga dengan keberadaan pondok pesantren. Pada awalnya, membangun pondok pesantren biasanya cukup mudah. Dalam pembelajaran, wetonan, sorogan, dan bandongan adalah sistem yang biasa digunakan. Namun, sejak tahun 1970, pondok pesantren mulai menawarkan mata pelajaran umum sebagai bagian dari program modernisasi. Pada awalnya, tujuan utama pondok pesantren adalah menyediakan santri untuk mendapatkan pengetahuan agama.

Pondok pesantren sekarang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama dan kepurbakaaan, tetapi juga menangani masalah sosial khususnya masyarakat di sekitarnya. Organisasi ini berfungsi dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Pondok pesantren juga memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dalam membangun komunitas dengan menghasilkan siswa yang berkualitas tinggi yang dapat bersaing dengan siswa yang belajar di institusi formal.

Pondok pesantren, yang diawali dengan pendidikan yang menanamkan nasionalisme yang kuat, memainkan peran penting dalam melawan penjajahan. Namun, selama ini, pondok pesantren masih memainkan peran penting, terutama bagi masyarakat pedesaan. Pendidikan di pondok pesantren saat ini semakin disempurnakan untuk memenuhi berbagai fungsi penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.



Pondok Gontor adalah salah satu pesantren yang terbukti menghasilkan siswa terbaik karena menuntut siswanya mahir berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Perubahan sosial dan budaya dapat dicapai melalui lembaga sosial seperti pesantren. Dalam hal ini, lembaga sosial lainnya dipengaruhi oleh perubahan lembaga sosial. Karena sistem sosial terdiri dari berbagai komponen. Pondok pesantren, sebagai tempat pendidikan agama, memiliki proses sosial yang unik karena menjadi bagian dari masyarakat.

Pada umumnya, pondok pesantren berfungsi sebagai bagian dari masyarakat dan untuk masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren bukan hanya lembaga yang ketat yang fokus pada studi kitab klasik. Saat ini pondok pesantren tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang lain seperti ekonomi, pedagogik sosial politik. Siregar dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 1995 di Pondok Pesantren Darunnajah Cipining Bogor, ditemukan hal tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat, mengembangkan kesempatan kerja. Pondok pesantren menerima tenaga sebagai pegawai mulai menjadi tukang bangunan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan pertanian pondok pesantren Darunnajah berasal dari masyarakat setempat. Selain itu, sebagai bagian dari upayanya untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan potensi yang dimilikinya, pondok pesantren membentuk kelompok tani di desa Argapura (Siregar, dkk, 1995).

Pondok pesantren tumbuh dan tersebar dengan cepat dewasa ini. Ini memenuhi permintaan masyarakat akan pendidikan tradisional dan kontemporer. Ini pasti akan berdampak positif pada perkembangan keilmuan di Indonesia dan membantu perkembangan pendidikan nasional. Pondok pesantren adalah lembaga kader ulama yang mengajarkan agama dan tradisi Islam.

Dikarenakan perkembangan pondok pesantren yang sangat pesat dan dampaknya juga sangat besar bagi masyarakat, meningkatnya perhatian pemerintah sebagai agen perubahan sosial, serta semakin beragamnya fungsi dan peran pondok pesantren dalam pembangunan masyarakat, menjadi



alasannya. Kajian ini bertujuan untuk lebih mendalami peran pondok pesantren dalam pengembangan pembangunan masyarakat, khususnya konsep strategi pembangunan dalam masyarakat yang menggelobal.

2. Konsepsi Pengembangan Masyarakat

a. Konsep dan Cakupan Pengembangan Masyarakat

Suharto (2005) mengatakan, *community development* adalah metode pekerjaan sosial dengan tujuan utama menggunakan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menekankan prinsip-prinsip partisipasi sosial. Pengembanagn masyarakat berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat di bidang sosial, politik, dan budaya melalui pengembangan masyarakat, yang menekankan pada partisipasi proses pertanian dan peran langsung masyarakat dalam pertanian.

Istilah *community development* dapat memiliki arti bagi orang yang berbeda-beda. Sandra Nasdian (2003), menyatakan bahwa *community development* adalah suatu proses program atau gerakan pembangunan masyarakat yaitu dari suatu keadaan atau keadaan tertentu ke keadaan berikutnya dengan kemajuan dan perubahan, proses bergerak dan bertahap. Program pengembangan masyarakat yang mengungkapkan serangkaian prosedur dan isinya sebagai daftar kegiatan berdasarkan standar yang ditetapkan untuk pengembangan masyarakat, dan sebagai cara untuk mencapai beberapa tujuan. Program pengembanagn masyarakat sebagai gerakan perjuangan untuk menjadi penyebab bagi orang untuk melayani orang lainnya. Dalam pengertian ini, pengembanagn masyarakat cenderung melembagakan, membangun struktur organisasinya sendiri, dan menerima prosedur dan praktisi profesional. Akibatnya, fokusnya adalah mendorong gagasan pengembangan masyarakat.

Devinisi *community development* yang di ungkapkan oleh PBB (1960) adalah “*community development is the processes by which the effort of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economy, social, and cultural conditions of communities, to integrate the communities into the life of the nation and enhance the contribute fully to nation*



progress” artinya, suatu proses upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat secara tradisional, oleh pemerintah atau badan lainnya.

b. Model-model Pengembangan Masyarakat

Suharto (2005) mengatakan, terdapat 3 cara yang membantu kita mengerti konsep pembangunan masyarakat: (1) Pengembangan masyarakat lokal, (2) Perencanaan sosial, dan (3) Aksi sosial.

1) Pengembangan Masyarakat Lokal

Dianggap sebagai suatu komunitas yang memiliki potensi tetapi belum sepenuhnya berkembang, pengembangan masyarakat lokal adalah suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan kemajuan sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota komunitas itu sendiri.

Pada dasarnya, pengembangan komunitas lokal adalah proses interaksi antara anggota komunitas lokal. Pekerja sosial membantu dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Tujuan proses lebih penting daripada tujuan tugas atau hasil. Pengembangan masyarakat yang bernuansa, yang dimulai dari bawah ke atas, bergantung pada pengembangan rencana untuk meningkatkan kemandirian, informasi, komunikasi, relasi, dan keterlibatan anggota masyarakat.

2) Perencanaan sosial

Perencanaan sosial adalah proses yang digunakan untuk membuat keputusan dan tindakan mengenai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kesehatan, kenakalan remaja, dan buta huruf. Perencanaan sosial lebih fokus pada tugas daripada pengembangan masyarakat lokal. Orang-orang yang kurang beruntung atau rentan secara sosial ekonomi biasanya menjadi pelanggan rencana sosial. Ini termasuk orang tua, cacat, janda, dan bahkan perempuan cacat sosial.

Sebagai perencana sosial, pekerja sosial melihat orang sebagai konsumen atau penetima manfaat. Pekerja sosial yang bekerja di lembaga formal dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, yang



membantu mereka membuat kebijakan, menetapkan tujuan, dan mengatasi masla. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat, dan penamaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemanusiaan

3) Aksi sosial

Tujuan dan sasaran penting dari tindakan sosial mewakili perubahan mendasar dalam institusidan struktur masyarakat mealui proses distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan ini dimulai dengan pandangan bahwa sistem klien sering menjadi “korban” ketidakadilan struktur. Mereka tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit yang menguasai sumber daya politik dan sosial mereka. Perilaku sosial didasarkan pada tujuan proses dan hasil. Komunitas diatur melalui proses pengakuan pemeberdayaan dan tindakan yang mengubah struktur kekuasaan agar lebih sesuai dengan prinsip domokrasi, kesetaraan dan keadilan.

Pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai perencanaan sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 1. Masyarakat dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan. 2. Menciptakan sinergi dengan strategi komprehensif pemerintah untuk pelibatan pemangku kepentingan dan publik. 3. Membuka akses bagi penduduk untuk dukungan teknis profesional, fasilitas dan insentif lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 4. Mengubah perilaku profesional menjadi lebih peka terhadap kebutuhan anggota masyarakat akan perhatian dan gagasan. (Ife, 1995 dalam Nasdian, 2003).

Konsep dan prinsip pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
- b) Tindakan bersama dan pembuatan program multiguna diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang sepenuhnya seimbang.
- c) Mengubah sikap masyarakat sama pentingnya dengan membuat kemajuan materi melalui program masyarakat pada tahap awal pembangunan.
- d) Pengembangan masyarakat menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan masyarakat.



- e) Setiap program harus berfokus pada dorongan lokal dan pelatihan pemimpin di masyarakat.
- f) Meningkatkan kepercayaan terhadap partisipasi perempuan dan pemuda dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat.
- g) Proyek swadaya memerlukan dukungan pemerintah yang terfokus dan menyeluruh.
- h) Program pembangunan program pengembangan masyarakat di tingkat nasional memerlukan penerapan kebijakan yang konsisten, struktur manajemen yang spesifik, perekrutan dan pelatihan pejabat lokal dan nasional, dan organisasi penelitian dan evaluasi eksperimental.
- i) Sumber daya LSM harus digunakan sepenuhnya dalam program pengembangan masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- j) Kemajuan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional harus diakui.

c. Pemberdayaan

Dalam wacana pembangunan masyarakat, istilah pemberdayaan selalu dikaitkan dengan istilah kemandirian, partisipasi, jejaring dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan didasarkan pada kekuatan pada tingkat individu dan masyarakat. Pemberdayaan telah didefinisikan sejak tahun 1987 dalam Hikmat (2001) sebagai pemahaman psikologis atas dampak kontrol individu terhadap kondisi sosial, kekuasaan politik dan hak-hak mereka di bawah hukum. Seperti Wisdom 2001, Mc Ardle (1989), mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh mereka yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Mereka yang telah mencapai tujuan kolektif mereka berkembang melalui upaya mereka sendiri dan mengumpulkan pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada hubungan eksternal. Tapi Mc Ardle menyiratkan bahwa ini menunjukkan pentingnya proses pengambilan keputusan, bukan lainnya. Pada tahun 2005, Aziz mengusulkan konsep pendekatan sosiokultural dalam pemberdayaan. Menurutnya, pendekatan sosiokultural merupakan salah satu



pendekatan yang dilakukan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat.

Selain pendekatan sosiokulturan ini, perubahan dapat dilakukan dengan pendekatan struktural, yaitu pendekatan *top-down* terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti agama, budaya, pendidikan, adat istiadat, ekonomi, politik, dan hukum. Aspek proses peruganahn sosial yang sering disebut dengan aspek sosiokulturan.

Di antara berbagai aspek tersebut, setiap komunitas memiliki aspek dominan yang dipengaruhi oleh sistem nilai masing-masingkomunitas. Misalnya pada masyarakat perkotaan aspek ekonomi dan pendidikan paling berpengaruh, sedangkan pada masyarakat pedesaan adat atau budaya setempat dan agama biasanya berpengaruh. Di komunitas santri sebaliknya agama adalah nilai yang paling berpengaruh.

Istilah perubahan sosial sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pembangunan dan pemberdayaan, namun istilah pembangunan kebanyakan bersifat *top down*, masyarakat hanyalah maksud dan tujuan pembangunan, sedangkan pemberdayaan umumnya bersifat *bottom up*, artinya menerapkan suatu strategi bahwa masyarakat dilibatkan sejak awal proses perencanaanhingga pelaksanaan dan keberlanjutan hasil pembangunan. Oleh karena itu, ia tidak hanya menjadi objek dan pelaku pembangunan masyarakat, tetapi juga menjadi subjek dan pelaku pembangunan. Antara pembangunan dan pemberdayaan, keduanya merupakan bagian dari proses perubahan sosial.

Menurut Aziz (2005), ada beberapa tahapan pemberdayaan:

- 1) Membantu komunitas mengidentifikasi masalah.
- 2) Lakukan analisis atau penelitian independen bersifat mandiri.
- 3) Prioritaskan maslah dalam hal mengategorikan dan memilih masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Menemukan cara untuk memecahkan maslah yang dihadapi oleh pendekatan sosiokultural yang ada di maysrakat.



- 5) Mengambil tindakan nyata untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- 6) Evaluasi urutan dan proses pemberdayaan secara keseluruhan untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan.

Oleh karena itu pelaku perubahan harus berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, karena masyarakat sendirilah yang paling memahami kebutuhannya, dengan pelaku eksternal hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses perubahan dan pemberdayaan.

Meskipun demikian, proses pemberdayaan masyarakat lainnya menekankan pada proses yang menginspirasi, mendorong, dan memotivasi individu untuk meningkatkan peluang mereka dalam mengarahkan pilihan hidup mereka, mengacu pada kemampuan untuk membangun pola hubungan sosial, termasuk hubungan antar individu dalam kelompok atau antar kelompok itu sendiri, dan kemampuan untuk mengembangkan diri bebas dari ketergantungan eksternal, sektor sosial ekonomi.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini berfokus pada kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dan kekuatan batin melalui kemampuan untuk melakukan kontrol internal dan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang kritis melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pranarka dan Vidyandika (1996) dalam Hikmat (2001) menyatakan bahwa dalam membalikkan arah pembangunan, fokus perhatian harus pada orang-orang dan kebutuhan mereka sendiri menurut standar mereka sendiri, bukan yang diperkirakan oleh para praktisi pembangunan masa lalu. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan dan pengoprasiaannya, perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan apakah seseorang sudah berdaya. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari budayanya dalam hal ekemampuan ekonomi, akses pelayanan sosial, dan keterampilan politik budaya. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan empat dimensi kekuasaan: kekuasaan di



dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power toe*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*).

d. Partisipasi

Nasdian (2003), mengemukakan bahwa konsep partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti berpartisipasi. Partisipasi berarti proses aktif, penggunaan alat dan proses (institusi dan mekanisme di mana anggota komunitas itu sendiri dapat memimpin dengan cara mereka sendiri, dan menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan sebagai: (1) anggota masyarakat terlibat dalam perilaku yang disusun atau dirancang dan dikendalikan oleh orang lain, (2) partisipasi adalah proses membangun kekuatan untuk keluar dari masalah sendiri. Titik awal partisipasi adalah memutuskan untuk bertindak dan merefleksikan tindakan itu sebagai agen yang sadar.

Sasmita (2006), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam pengembanaan anggota masyarakat, termasuk kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam pembangunan pedesaan adalah pembharian kesadaran dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan pogram/proyek yang dilaksanakan.

Secara umum, sisi positif dari partisipasi adalah program-program yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan dasar mereka yang sebenarnya. Ini adalah cara penting untuk membuat keberlanjutan program lebih efisien, karena membantu mengidentifikasi strategi dan teknik yang tepat dan mengurangi beban pusat dalam hal pendanaan, staf dan materi. Sisi negatifnya, bagaimanapun partisipasi mengendurkan otoritas manajemen senior, membuatnya lebih sulit untuk mengukur akuntabilitas kepemimpinan senior, memperlambat proses pengambilan keputusan dan memperlambat implementasinya. Karena programnya cukup beragam. Selain itu program ini juga dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kelompoknya sendiri.



Jika diperhatikan dengan seksama, peserta yang berbeda memiliki konsep partisipasi yang berbeda pula. Syahyuti (2005), di mana para ahli mengklasifikasikan beberapa model partisipasi, antara lain:

- 1) Partisipasi pasif atau manipulatif adalah bentuk partisipasi yang paling tidak berkarakter. Pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek tidak mempertimbangkan reaksi masyarakat sebagai tujuan program. Informasi dibatasi untuk para profesional di luar kelompok sasaran murni.
- 2) Partisipasi informatif. Komunitas desain hanya menjawab pertanyaan tentang proyek dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- 3) Partisipasi konsultasi. Masyarakat berpartisipasi melalui musyawarah, sementara pihak luar mendengarkan dan menganalisis masalah dan solusinya. Tidak ada kemungkinan pengembalian keputusan bersama dalam pola ini.
- 4) Partisipasi insentif. Masyarakat menawarkan pengorbanan dan jasa untuk menerima imbalan atau insentif berupa upah walaupun mereka tidak terlibat dalam proses pembelajaran atau percobaan yang dilakukan.
- 5) Partisipasi fungsional. Masyarakat dalam kerangka proyek, setelah membuat keputusan penting pada tahap awal, masyarakat menjadi tergantung pada pihak luar namun lambat laun menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi masyarakat secara interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis kegiatan perencanaan dan pembangunan atau penguatan kelembagaan. Pola ini cenderung mencakup cara mencari sudut pandang yang berbeda dalam proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran dalam mengatur pelaksanaan keputusan agar dapat terlibat dalam keseluruhan proses kegiatan.
- 7) Mandiri. Tidak terpengaruh oleh pihak luar, secara sistematis dan bebas mengambil inisiatif sendiri untuk mengubah sistem dan nilai yang mereka junjung tinggi.



3. Bentuk Dan Strategi Pengembangan Masyarakat

Pondok pesantren pada dasarnya bertahan hingga saat ini karena ada orang-orang yang membutuhkannya baik dari kalangan masyarakat biasa maupun pemerintahan sebagai lembaga untuk menjalankan misi kemasyarakatannya, yaitu lembaga pendidikan yang sangat dekat dengan masyarakat. Pondok pesantren dianggap sebagai tempat pendidikan akhlak dan memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis agama. Dahulu pondok pesantren hanya mempelajari ilmu-ilmu agama klasik dan ketat, namun saat ini banyak pondok pesantren yang mempelajari tidak hanya materi pendidikan agama, tetapi juga mata pelajaran lain seperti kewirausahaan, pertanian, peternakan dan lain-lain yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama.

Pondok pesantren sebagai lembaga sosial mulai berkembang pada tahun 1970-an, namun perubahan dan perkembangan tersebut dapat dilihat dari dua segi. Pertama, pondok pesantren telah mengembangkan kualitas yang luar biasa dan mencengangkan baik di pedesaan (rural), pinggiran kota (sub urban), maupun perkotaan (urban). Menurut data Departemen Agama, pada tahun 1985 terdapat kurang lebih 6.239 pondok pesantren dengan populasi santri sebanyak 1.084.801. Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1997, Departemen Agama menemukan bahwa jumlah pondok pesantren meningkat sebesar 224% atau sekitar 9.388 pondok pesantren, dan peningkatan jumlah santri mencapai 261% atau 1.770.768 santri. Pada tahun 2001, jumlah pondok pesantren mencapai 11.312, dengan jumlah santri 2.737.805, dan pada tahun 2007 jumlah pondok pesantren mencapai 16.015 buah dengan jumlah santri 3.190.394 orang. (www.ditdpontren.kemenag.go.id).

Perkembangan kedua, dalam praktik pendidikan sejak tahun 1970-an, bentuk pendidikan di pondok pesantren sangat berbeda, sudah mengalami perluasan dan kemajuan, bukan saja berfokus pada persoalan agama tetapi sudah mengurus hal-hal yang bersifat umum dan persoalan kemasyarakatan. Proses pendidikannya pun menjadi penuh waktu atau bahkan ditugaskan dari pihak luar pondok pesantren (Haidar, 2007).



Kajian Lembaga Penelitian dan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) terhadap jumlah pondok pesantren di Jawa Barat pada pertengahan tahun 1970-an menunjukkan bahwa pondok pesantren telah lama memainkan peran sosial yang berpengaruh. Kewajiban sosial pondok pesantren tidak mengurangi pentingnya kewajiban agama. Perannya adalah untuk menggambarkan nilai-nilai kehidupan keagamaan untuk kepentingan masyarakat luas. Tugas seperti inilah yang menjadikan pondok pesantren sebagai milik bersama, didukung dan dipelihara oleh masyarakat yang lebih luas dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekolah diposisikan sebagai elemen penting dari struktur piramida sosial masyarakat Indonesia (Departemen Agama, 2004).

Adanya posisi penting yang ditempati pondok pesantren menuntutnya agar berperan penting dalam segala proses pembangunan masyarakat baik melalui pendidikan maupun pengembangan potensi masyarakat yang dimiliki pondok pesantren saat ini dalam dunia pendidikan. Strategi yang dilakukan pondok pesantren adalah memperkuat santri dan masyarakat di berbagai wilayah yang dikembangkan oleh lembaga yang telah berkembang sebelumnya, seperti:

a. Kelembagaan Pendidikan

Keberadaan televisi dan radio membuat masyarakat pedesaan sangat peka terhadap perkembangan baru, namun perkembangan dan perubahan tersebut didorong oleh keterampilan dan kemampuan intelektual, karena tingkat pendidikan masyarakat pedesaan masih relatif rendah. Oleh karena itu, mengingat proses pembelajaran dan proses formal lainnya di sekolah saat ini merupakan satuan pendidikan, maka pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan milik masyarakat merupakan basis pengembangan sumber daya manusia atau untuk mewujudkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Pendidikan di sekolah telah mengalami pergeseran yang signifikan dari tujuan semula, pendidikan formal yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi, menjadi hanya pencapaian nilai-nilai akademik dan minimnya keteladanan guru (Nandika, 2005). Dalam dinamika perkembangan tersebut, pondok pesantren tetap kokoh dan konsisten dikenang sebagai lembaga pendidikan yang



mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Tugas yang sangat berat untuk memperluas sistem pendidikan umum. Sekolah Al-Qur'an modern (www.pikiranrakyat.com).

Dalam konteks ini, di mana perubahan baru semakin diperkenalkan pada keberadaan pondok pesantren, pondok pesantren tetap menjadi sarana alternatif pelestarian ajaran Islam. Dalam dinamika kehidupan masyarakat pondok pesantren telah mampu beradaptasi dan melaksanakan dakwahnya.

Di sisi lain, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang secara sistematis melatih kader-kader kepemimpinan sosial di kemudian hari, pondok pesantren adalah lembaga kerakyatan, dan dari mana pun mereka berasal, tidak ada larangan yang berlaku. Siapapun bisa menjadi santri tanpa kualifikasi, karena semua manusia di hadapan Allah sama.

Pondok pesantren turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat pedesaan, dbuktikan dengan adanya kerjasama antara pondok pesantren dengan pemerintah desa dalam program peningkatan pendidikan daerah. Saat ini, alasan masyarakat tidak bisa mengentam pendidikan karena alasan ekonomi. Kesempatan terbuka untuk belajar di pondok pesantren yang tidak memikirkan maslah biaya, hal ini biasanya mereka mengabdikan diri kepada pihak pondok pesantren dengan bekerja di badan usaha yang dimilikinya. Selain itu, banyak juga lulusan yang mendirikan lembaga pendidikan lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Al-hasil, pendidikan di pondok pesantren secara kelembagaan tidak cukup memeperbaiki aspek yang ada di internal pondok pesantren, termasuk pengembangan manajemen dan kurikulum, namun harus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.

b. Kelembagaan Ekonomi

Perekonomian pedesaan yang lebih baik dapat dicapai dengan memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan produktif. Masyarakat mungkin tidak perlu melakukan kegiatan produksi yang membutuhkan penggunaan barang-barang ekonomi atau perdagangan. Sektor jasa dapat terus beroperasi dan akan



membangkitkan banyak minat pada mereka yang memiliki sedikit akses ke sana, koperasi yang dipraktikkan oleh pondok pesantren saat ini adalah unit simpan pinjam (USP) dari pondok pesantren yang dibuka untuk masyarakat desa, namun sasaran utamanya adalah yang sudah memiliki usaha dan yang belum memiliki usaha namun berkeinginan untuk memulai. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan harus juga dikembangkan.

c. Kelembagaan Pertanian

Berangkat dari keyakinan bahwa Allah swt menganugrahkan karunia berupa tanah, air dan semua makhluk yang hidup termasuk berbagai tumbuhan dan hewan itu semua diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Pondok pesantren kemudian berusaha memanfaatkannya dengan memilih sektor agribisnis. Pondok pesantren mengembangkan agribisnis berangkat dari asumsi bahwa kebutuhan manusia berasal dari pertanian, dan berkeyakinan pula bahwa orang yang sering berinteraksi dengan tanah cenderung hidupnya lebih lama.

Selain itu, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, namun menjadi negara yang rawan pangan, dan pemerintah gagal mengurangi angka kemiskinan melalui pembangunan dan dukungan sarana prasarana publik. Kebijakan pemerintah pusat yang telah dijalankan selama ini (dari atas ke bawah) di mana kebijakan tersebut memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki secara mendasar (Maulana, 2007).

Dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi, diharapkan masyarakat desa tidak lagi berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan. Masyarakat desa berupaya menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya alam desa. Hingga saat ini, ekonomi tetap urban-centrik, menarik masyarakat pedesaan yang terus menerus datang ke kota untuk mencari penghasilan dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Memakai istilah yang sering diungkapkan, bahwa roda ekonomi itu seperti gula dan masyarakat itu seperti semut, semut terus datang ke kota untuk mendapatkan gula, selama gula itu terus berkonsentrasi di kota. Tetapi jika gula



tersedia di desa maka semut tidak harus pergi jauh untuk mendapatkan gula tersebut.

Program agribisnis ditujukan kepada santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren serta memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi keluarga di daerah ini harus meliputi pesawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Karena Indonesia adalah negara yang cukup besar untuk masalah pertanian dan kelautan, juga untuk memperkuat kedaulatan pangan.

d. Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Peran pondok pesantren dalam meningkatkan moral masyarakat dilakukan melalui pengembangan lembaga pengajian, idelanya kegiatan ini dilakukan rutin mingguan sebagai wadah untuk meningkatkan semangat dan moral masyarakat desa. Pengajian adalah pertemuan informal yang bertujuan untuk mengajarkan dasar-dasar agama kepada masyarakat umum, sehingga pengajian sangat penting upaya untuk mengislamkan massa (Horikoshi, 1987).

Dalam kegiatan pengajian ini, kyai mendemonstrasikan pembahasan Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan isu-isu global yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah keluarga, maupun masyarakat. Menurut Horikoshi (1987), kegiatan pengajian memiliki beberapa fungsi, antara lain: pertama, merupakan perbuatan baik, para ulama mendorong untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kedua, menghidupkan kembali perintah-perintah Allah swt, yang sudah terlupakan. Ketiga, menjalin silaturahmi dengan para ulama dan jama'ah lain serta menguatkan *ukhuwah islamiyah*.

Idealnya, bentuk lembaga sosial dan keagamaan harus berdimensi sosial, tidak hanya berupa pengajian pada umumnya, tetapi juga berupa bahti sosial dan bentuk dakwah lainnya untuk menghidupi masyarakat. Tindak lanjut dan tindakan nyata itu lebih baik daripada sekedar kata-kata, sehingga bersifat situasional, metodis dan terstruktur.



D. PENUTUP

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas dan *indigenous* yang turut melestarikan nilai-nilai *tafaqqahu fi ad-dind* dan pembentukan karakter. Di sisi lain globalisasi saat ini menyebabkan banyak perubahan dalam masyarakat. Karena kemajuan pesat dalam pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial tidak bisa dihindari. Hal ini menjadi tantangan bagi pondok pesantren untuk berkembang baik secara kelembagaan maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai aktor, baik masyarakat maupun pemerintah untuk mewujudkannya.

Adapun dalam konteks peran pondok pesantren telah dilaksanakan dengan baik dalam pengembangan masyarakat, yang menunjukkan kualitas hubungan hubungan sosial dan kemajuan yang terencana dan bertahap, seperti meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kepemimpinan, membangun kelembagaan baru, dan memulai pembangunan ekonomi dan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, Mosses Caesar. 2007. *Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. <http://fpks-dpr.or.id/new/main.php?op=isi&id=2948>.
- A'la, Ach Syaiful. 2007. www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/07/0806.htm -22k.
- Amir, Syafrudin. 2005. *Pesantren Sebagai Pembangkit Moral Bangsa*. www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/03/11wacana01.htm.
- Anwar dan Matahari. 2006. *Peranan Pondok Pesantren Al-Basyariyah Dalam Mempersiapkan Santri Memiliki Daya Saing Tinggi*.
- Dohfier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Haedari, Amin. 2007. *Perluasan Peran Pesantren*. http://tabloid_info.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=27
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Halevy, Eva, *Social Change, The Advent and Maturation of Modern Society*, London and
- Ahmad Royani dan Dwi Noviani: Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi**



New York: Keegan Paul, 1987.

Harahap, Syahrin, *Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Mulyana, Dedy, 20017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyadkaya,

Maulana, Ilham. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penyadaran Alokasi Dana Desa (ADD)*. <http://www.geocities.com/lokkie2005/pk220306.htm>.

Nandika, Dodi. 2005. *Pesantren Sebagai Basis Pembangunan Wilayah*. http://www.republika.co.id/kolomdetail.asp?id=188820&kat_id=6.

Naissbitt, John, and Aburdance, Patricia, *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*, terj. FX Budianto, Jakarta: Binarupa Aksara, 1990.

Nasdian, Fredian Tonny. 2003a. *Diktat Kuliah Pengembangan Masyarakat*. Tidak Diterbitkan. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Nasdian, Fredian Tonny. 2003b. *Kelembagaan Sosial dalam Sosiologi Umum*. Tidak Diterbitkan. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Soekanto, Sarjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Saefurrohman. 2005. *Peranan Pesantren dalam Pemberdayaan Umat*. http://www.republika.co.id/kolomdetail.asp?id=17890&kat_id=6.

Siregar, Halimah. 1995. *Peranan Pesantren Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Development) Bagi Masyarakat Desa (studi kasus: Pesantren Darrunnajjah Cipining, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Program Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan.

www.dtpdpontren.kemenag.go.id